



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WILDAN
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 18834

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.589.103.000**

1. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 224.128.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/111 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.203.700.000
3. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 725.830.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 695 m2/370 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, WARISAN Rp. 393.320.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1385 m2/288 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, WARISAN Rp. 503.550.000
6. Tanah Seluas 8220 m2 di KAB / KOTA PESAWARAN, WARISAN Rp. 538.575.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 749.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4L DAKAR (4X2) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOBIL, HONDA CR-V 1.5 TC PRESTICE CVT CKD Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. ----**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.910.778.358**

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 38.487.160

Sub Total

Rp. 7.287.368.518

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 7.287.368.518

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.